

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.November 30/09
Judul	: Rembuk Transparansi	Tanggal	: 30 November 2016
Sub Judul	: Pemerintah Harus Memperbaiki Kinerja Keterbukaan Informai Semua Sektor	Tahun	: 2016
		Penulis	: FITRA RIAU*

Pres Rilis
“REMBUK TRANSPARANSI”
Pemerintah Harus Memperbaiki Kinerja
Keterbukaan Informasi Semua Sektor

Kajian Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA RIAU), menunjukkan bahwa kinerja pemerintah se Provinsi Riau dalam keterbukaan informasi masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan diseluruh daerah Provinsi Riau masih sangat rendah, berada dibawah angka 25%. Kinerja keterbukaan informasi mutlak harus diperbaiki dan ditingkatkan, karena transparansi menjadi salah satu strategi untuk mencegah korupsi diberbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau, sejak 2013-2016 menunjukkan trend yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar sengketa informasi yang diajukan merupakan informasi yang mestinya tidak harus disengketakan. Dari 151 sengketa informasi terdapat 102 sengketa yang berkaitan dengan dokumen atau informasi anggaran. Fakta ini, menunjukkan badan publik khususnya pemerintah daerah belum memiliki keseriusan dalam memperbaiki kinerja pengelola keuangan yang jelas-jelas telah dinyatakan terbuka oleh UU.

Selain itu, tranparansi dalam tata kelola hutan dan lahan menjadi penting untuk ditingkatkan. Praktik buruk dan cenderung tertutup dalam tata kelola hutan lahan ini berdampak pada besarnya potensi kerugian negara, konflik, serta kerusakan lingkungan hidup. Temuan Fitra Riau tahun 2016, menunjukkan potensi kerugian daerah provinsi Riau dari penerimaan DBH PSHD dan DR mencapai Rp. 795 Triliun dalam kurun waktu 2010-2014. Tidak hanya itu, data yang rilis *Indonesia Anti Corruption Forum* (IACF) tahun 2016, potensi kerugian negara non pajak dari sektor kehutanan di Indonesia mencapai Rp. 169 Triliun, sebagian besar ada di Provinsi Riau.

Kondisi pemerintah yang tertutup ini beririsan dengan tumbuh suburnya pratik korupsi terjadi diberbagai sektor. Fakta yang memprihatinkan, tahun 2016, Provinsi Riau merupakan satu dari tiga daerah yang dikategorikan menjadi daerah **zona merah rawan korupsi** oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasannya adalah, belum adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang memadai dan dilakukan secara transparan.

Korupsi akan sulit untuk dicegah dan diberantas khususnya diprovinsi Riau, jika prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan tidak dijalankan dengan mengedepankan prinsip ketebukaan. Wujud keterbukaan yang mestinya harus dilakukan adalah dengan diimplementasikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi faktanya, masih banyak pemerintah daerah di provinsi Riau yang masih abai terhadap kewajiban – kewajiban yang amanatkan dalam UU tersebut.

Kewajiban yang diabaikan oleh pemerintah seperti, adanya Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif untuk menjalankan tugas dan fungsi melakukan pelayanan infomasi publik kepada masyarakat. Meskipun semua daerah telah memiliki PPID akan tetapi belum aktif menjalankan tugas dan fungsi yang sesungguhnya. Kebanyakan hanya sebatas gugur kewajiban. Selain, itu adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi secara berkala juga diabaikan oleh badan publik pemerintah. Serta kewajiban – kewajiban lainnya yang mendukung keterbukaan informasi masih banyak dabaikan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Riau.

“Rembuk transparansi” yang digagas oleh Fitra Riau bersama Komisi Informasi Provinsi Riau ini, dalam upaya untuk mendorong dan memastikan diperbaikinya transparansi khususnya badan publik pemerintah di Provinsi Riau. Salah satu titik tekan dalam Rembuk Transparansi, bagaimana komitmen pemerintah kedepan dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain sektor lainnya, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan transparansi dalam tata kelola hutan dan lahan.

CP:

Usman (Koord. Fitra Riau) 0852-7161-4521